



# INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019



Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sidoarjo



**INDIKATOR EKONOMI  
KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengarahkan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata, dan terus meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Visi dan Misi serta program yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Berbagai indikator perekonomian sangat diperlukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi dari seluruh program pembangunan yang dilaksanakan untuk lebih menjamin tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Publikasi Indikator Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 ini berusaha untuk menampilkan berbagai Indikator Utama Pembangunan Ekonomi sebagai tolok ukur pencapaian proses pembangunan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2018.

Data-data pendukung dalam publikasi ini berasal dari beberapa sumber diantaranya adalah dari hasil survei maupun hasil publikasi yang telah ada dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik serta data pendukung dari instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo.

Kami sangat berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini. Akhirnya, kami berharap semoga penulisan buku ini memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, Desember 2019  
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sidoarjo

Drs. Setyo Winarno, M.Si  
NIP. 19641016 199103 1 010

**DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Daftar tabel</b> .....	iv
<b>Daftar Grafik</b> .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Umum .....	1
1.2. Target Indikator Utama Pembangunan .....	2
1.2.1. Produk Domestik Regional Bruto .....	2
1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi .....	3
1.2.3. Statistik Harga Konsumen Pedesaan.....	5
1.2.4. Indeks Gini .....	5
1.2.5. Indeks Pembangunan Manusia .....	6
1.2.6. Inflasi .....	7
1.3. Tujuan Penulisan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. METODOLOGI INDIKATOR EKONOMI</b> .....	9
2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	9
2.2. Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 .....	10
2.3. PDRB Perkapita .....	11
2.4. Laju Inflasi .....	12
2.5. Statistik Harga Konsumen Perdesaan .....	13
2.6. Indeks Gini .....	15
2.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	17
2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	19

<b>BAB III. INDIKATOR PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI ...</b>	<b>21</b>
3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2018 .....	21
3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2018 .....	23
3.3. Struktur Perekonomian .....	27
3.4. PDRB perkapita .....	30
3.5. Laju Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 .....	32
3.6. Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018..	37
3.7. Indeks Gini .....	40
3.8. Realisasi APBD.....	41
3.9. Indeks Pembangunan Manusia .....	44
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>48</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 – 2018 (milyar rupiah).....	21
Tabel 3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 – 2018 (milyar rupiah).....	22
Tabel. 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 – 2018 (persen) .....	23
Tabel 3.4. Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 – 2018 (persen) .....	29
Tabel 3.5. Perbandingan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 – 2018 .....	31
Tabel 3.6. Inflasi Kumulatif 9 Kabupaten/ Kota dan Jawa Timur Tahun 2018 ...	33
Tabel 3.7. Laju Inflasi dan Andil Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Periode Januari – Desember 2018).....	34
Tabel 3.8. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 - 2018.....	42
Tabel 3.9. Angka IPM dan Rangking IPM Kabupaten Kota Se-Jawa Timur Tahun 2018.....	45
Tabel 3.10. Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 - 2018.....	47

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 3.1.	Perbandingan Sektoral PDRB Kabupaten Sidoarjo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 - 2018 ....	27
Grafik 3.2.	Perbandingan Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2018 .....	32
Grafik 3.3.	Perkembangan Inflasi Bulanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 - 2018 .....	36
Grafik 3.4.	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2018 .....	40
Grafik 3.5.	Persentase Rincian Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 - 2018 .....	43

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

1.1. Umum

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengarahkan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan usaha menggeser (peranan) dari kegiatan yang dominan di sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020. Visi dan misi tersebut tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Sidoarjo dan bukan hanya menyentuh wilayah maupun kelompok masyarakat tertentu.

RPJP Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat setempat dan berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Sidoarjo. Agenda dan prioritas pembangunan yang telah disusun dan dirancang di dalam RPJMD akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan saat ini maupun tahun mendatang. Pada akhirnya pembangunan yang telah dilaksanakan akan mewujudkan kemakmuran bersama serta tidak boleh ada yang terpinggirkan dari proses dan hasil pembangunan.

Untuk mewujudkan program/kegiatan perencanaan yang sesuai dengan visi, misi dan strategi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, sangat diperlukan dukungan data statistik yang akurat, lengkap dan terkini. Data statistik tersebut akan menjadi suatu instrumen



yang sangat berguna untuk memonitor proses pembangunan yang sedang berjalan maupun sebagai alat evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur telah melakukan kristalisasi terhadap lebih dari seratus indikator pembangunan yang tertuang dalam PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi 5 (lima) indikator pembangunan utama. Lima Indikator Pembangunan Utama tersebut meliputi 2 (dua) indikator sosial (pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin), 3 (tiga) indikator pembangunan ekonomi (Pertumbuhan ekonomi dan indeks disparitas wilayah) serta 1 (satu) indikator sosial ekonomi (Indeks Pembangunan Manusia).

Pemilihan 5 (lima) Indikator Pembangunan Utama tersebut dimaksudkan untuk lebih memudahkan para perencana pembangunan dan juga seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan, memonitor dan melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan berdasarkan indikator yang relatif lebih ringkas namun tetap komprehensif. Selain itu, kristalisasi indikator utama pembangunan tersebut akan mampu membuat keterbandingan antar waktu dan antar wilayah.

### 1.2. Target Indikator Utama Pembangunan Ekonomi

Sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan, maka sangat penting dan perlu untuk menyajikan angka-angka dari masing-masing indikator utama tersebut sebagai target yang akan dicapai. Penentuan target tersebut juga akan menjadi landasan evaluasi bagi para seluruh pemangku kepentingan terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo.

#### 1.2.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-

residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini menyajikan angka-angka periodik, yang masing-masing disusun menurut lapangan usaha, baik atas dasar harga berlaku (*Curent Prices*) maupun atas dasar harga konstan (*Constant Prices*).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB disajikan secara berkala dirinci menurut lapangan usaha atau sektoral, serta jenis penggunaannya atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan pada tahun dasar tertentu. Dalam hal ini, tahun dasar terbaru yang digunakan adalah tahun 2010. Dengan menggunakan tahun dasar (Tahun 2010), artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar berasal dari perkembangan produksinya saja karena faktor harga telah dihilangkan dengan cara mengacu pada harga pada satu titik tahun dasar (harga tahun 2010).

### 1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan wilayah, khususnya pembangunan bidang ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menciptakan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata dan meningkatkan hubungan ekonomi wilayah. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar mampu memberikan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara riil. PDRB atas dasar harga konstan (riil)

disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin besar penciptaan kue pembangunan. Dengan kebijakan terpadu, holistik dan *pro-poor*, maka kue pembangunan tersebut akan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Rancangan program yang dicanangkan para pemangku kebijakan yang bersinergi dengan pelaku ekonomi di Sidoarjo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program-program pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2011-2015 meliputi:

1. Peningkatan daya saing sektor UMKM dan koperasi.

Peningkatan daya saing sektor UMKM dan koperasimerupakan langkah strategis. Kedua sektor ini memiliki peran besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta pada penciptaan lapangan kerja baru. Peningkatan daya saing kedua sektor ini diharapkan akan menjadi motor untuk peningkatan potensi dan daya saing . Adapun program yang dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan program pengembangan industri kecil dan menengah.

2. Peningkatan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian berbasis agrobisnis.

Beberapa program untuk memacu pertumbuhan sektor-sektor yang menjadi andalan Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan beberapa indikator meningkatnya pelaku usaha perdagangan, meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan serta meningkatnya nilai ekspor daerah.
- Program peningkatan pasar dengan mendorong lebih banyak pedagang yang menempati pasar-pasar yang ada.
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Program peningkatan produksi peternakan dan hasil peternakan.
- Program pengembangan perikanan tangkap

- Program pengembangan destinasi pariwisata
- Program pengembangan kemitraan
- Program pengembangan pemasaran pariwisata

### 1.2.3. Statistik Harga Konsumen Perdesaan

Tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan pembangunan, khususnya di sektor pertanian, karena sektor ini masih mendominasi kegiatan perekonomian di daerah pedesaan terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan tersebut adalah daya beli masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, informasi tentang harga khususnya harga konsumen berbagai komoditas di daerah pedesaan sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah pedesaan.

Pelaksanaan survei ini adalah daerah pedesaan. Di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 masih terdapat 322 pedesaan, sementara status perkotaan terdapat pada 31 kelurahan. Oleh karena itu di tahun 2018 survei harga konsumen pedesaan dilaksanakan hanya pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Prambon, Tulangan dan Waru. Dasar terpilihnya ketiga kecamatan tersebut dikarenakan sentra produksi pertanian, sehingga pasar yang cenderung ramai di kecamatan tersebut yang menjadi sampel survei harga ini.

### 1.2.4. Indeks Gini

Hasil-hasil pembangunan harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Kondisi ini bisa diartikan bahwa proses pembangunan harus dilakukan secara merata di semua wilayah sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang relatif merata pula. Namun demikian, adanya perbedaan posisi geografis, sumber daya maupun sarana dan prasarana antar wilayah menyebabkan masih adanya ketimpangan/disparitas dari percepatan pembangunan

yang terjadi. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu maupun rendahnya tingkat mobilitas faktor-faktor produksi juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah.

Ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah yang berdampak pada tidak meratanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat perlu untuk segera ditanggulangi. Kebijakan yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya, kemudahan mobilisasi faktor-faktor produksi sehingga terjadi distribusi pendapatan yang lebih baik harus terprogram secara tepat untuk mengurangi adanya disparitas antar wilayah. Program, kebijakan maupun strategi pembangunan juga harus lebih mempertimbangkan kondisi kewilayahan untuk lebih mendapatkan hasil pendistribusian pendapatan yang lebih merata.

Salah satu indikator untuk memperoleh informasi mengenai tingkat distribusi pendapatan masyarakat adalah Indeks Gini (*Gini Ratio*). Indeks Gini ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil dari satu. Semakin tinggi Indeks Gini berarti distribusi pendapatan semakin tidak merata dan begitupun sebaliknya semakin rendah Indeks Gini maka akan semakin merata distribusi pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

### 1.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dalam proses pembangunan. Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Dalam kaitannya dengan pembangunan manusia, makna pembangunan suatu perubahan masih relevan jika diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada manusia, dilihat dari sisi ekonomi dan sosial. Dengan mengamati perubahan atau perkembangan manusia dari sisi ekonomi dan sosial, maka dapat dijadikan sebagai Indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-programnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sebagai alat ukur tunggal dan sederhana, IPM sangat cocok sebagai alat ukur kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara lebih spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah.

### 1.2.6. Inflasi

Inflasi adalah salah satu indikator yang penting dalam perekonomian suatu wilayah. Nilai inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat. Ketika inflasi tinggi, maka daya beli masyarakat akan barang dan jasa cenderung akan menurun. Hal ini juga berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi wilayah.

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Indikator Perekonomian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 ini sebagai upaya memberikan fakta empiris pembangunan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018. Berbagai program dan strategi pembangunan telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuan pembangunan terutama pembangunan ekonomi yang pada hakikatnya adalah menciptakan masyarakat yang makmur merupakan amanat yang diemban oleh seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam publikasi ini akan dipaparkan berbagai indikator pembangunan terutama pembangunan ekonomi yang merupakan agenda pemabangunan Kabupaten Sidoarjo yaitu PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, distribusi pendapatan dan beberapa indikator lainnya.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Ekonomi Kabupaten Sidoarjo disusun menjadi 3(lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I. memuat uraian umum mengenai indikator kinerja utama perekonomian Kabupaten Sidoarjo serta tujuan penulisan dan sistematika penulisan.
2. Bab II. memuat konsep dan definisi mengenai indikator makro ekonomi.
3. Bab III. memuat capaian indikator kinerja pembangunan ekonomi.
4. Bab IV. memuat indikator tujuan strategis pembangunan ekonomi dengan ulasan beberapa indikator terkait APBD dan pembangunan sektoral.
5. Bab V. Kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**METODOLOGI INDIKATOR EKONOMI**

**2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisinya, PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Jadi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara Agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/ balas jasa kepada faktor-faktor produksi di daerah tersebut, atau merupakan “*PRODUCTION ORIGINATED*”.

Di dalam PDRB disebutkan bahwa nilai barang dan jasa adalah yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya tahunan atau triwulanan). Rebasings (pergeseran tahun dasar terakhir) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam 17 kategori lapangan usaha, yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi



12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

PDRB disajikan dalam dua dasar penghitungan:

- a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), yaitu penyajian PDRB yang menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Dalam melihat struktur ekonomi suatu wilayah, biasanya digunakan PDRB atas dasar harga berlaku.
- b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), yaitu penyajian PDRB yang menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu (disebut tahun dasar). Mulai tahun 2005 penghitungan PDRB atas dasar harga konstan yang didasarkan pada harga-harga tahun 2000. Karena menggunakan harga konstan (tetap), maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan perkembangan riil dari kuantum produksi dan sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini, pertumbuhan riil ekonomi dapat dihitung.

### **2.2. Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010**

Pertumbuhan PDRB diperoleh dari pengolahan indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan 2010. Indeks berantai tersebut merupakan hasil pembagian nilai PDRB masing-masing tahun dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Apabila angka indeks ini dikalikan dengan 100, dan hasilnya dikurangi 100, maka akan didapatkan nilai yang menunjukkan tingkat agregat pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun.

Penghitungan pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun dirumuskan sebagai berikut:

$$PE = IB - 100 = \left[ \frac{PDRB_t}{PDRB_{t-1}} \times 100 \right] - 100$$

Dimana:

$PE$	= Pertumbuhan Ekonomi
$IB$	= Indeks berantai masing-masing tahun
$PDRB_t$	= PDRB tahun ke- t
$PDRB_{t-1}$	= PDRB tahun ke- t-1

### 2.3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin besar jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayah tersebut, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Meskipun terdapat keterbatasan, Indikator PDRB perkapita ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa di wilayah tersebut.

Dalam rangka mengakomodir rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai tahun dasar yang digunakan dalam penghitungan PDB/PDRB dan melaksanakan kesepakatan bersama maka mulai tahun 2014 penyusunan PDRB Kabupaten Sidoarjo menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar baru.

PDRB perkapita umumnya disajikan atas dasar harga berlaku yang dirumuskan sebagai berikut:

$$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{\text{Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun}}$$

Peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini masih memiliki keterbatasan, yaitu belum menunjukkan peningkatan sebenarnya dari daya beli perkapita karena beberap[a hal sebagai berikut:

- a. PDRB perkapita masih belum dapat mendeteksi kesenjangan penguasaan aset dan penerimaan balas jasa faktor produksi. Angka ini baru memberi petunjuk rata-rata pendapatan perkapita suatu wilayah.
- b. Tingkat kenaikan harga masih ada di dalamnya.
- c. Tingkat pertumbuhan penduduk juga masih berpengaruh.

#### **2.4. Laju Inflasi**

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian ketika terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Kenaikan harga-harga ini dapat terjadi karena kuatnya permintaan masyarakat (*demand pull inflation*), meningkatnya biaya produksi secara terus menerus (*cost push inflation*) atau karena perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang.

Naik turunnya harga ini dipantau secara mingguan, dua mingguan dan bulanan berdasarkan paket komoditas hasil pendataan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2010. Survei Biaya Hidup juga menghasilkan Nilai Konsumsi Dasar ( $P_0Q_0$ ), yaitu nilai yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memperoleh suatu komoditi yang dikonsumsi pada tahun dasar (tahun dilakukannya SBH).

Dalam harga yang dikumpulkan dan Nilai konsumsi hasil SBH diolah dalam bentuk indeks yang dikenal dengan sebutan Indeks Harga Konsumen (IHK). Tidak seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur melaksanakan SBH. Kabupaten Sidoarjo untuk penghitungan nilai konsumsi menggunakan nilai konsumsi Kota Surabaya sebagai kota terdekat yang melaksanakan SBH.

Formula indeks yang digunakan untuk menghitung IHK masing-masing kota adalah berdasarkan *Formula Laspeyres* dengan modifikasi sebagai berikut:

$$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)}}}{\sum_{i=1}^k P_{0i}Q_{0i}} \times P_{(n-1)i}Q_{0i} \times 100$$

Dimana:

- $IHK_n$  = Indeks Harga Konsumen bulan ke- $n$
- $P_{ni}$  = Harga jenis barang  $i$ , bulan ke-  $n$
- $P_{(n-1)i}$  = Harga jenis barang  $i$ , bulan ke-  $(n-1)$
- $P_{(n-1)i}Q_{0i}$  = Nilai konsumsi jenis barang  $i$ , bulan ke-  $(n-1)$
- $P_{ni}Q_{0i}$  = Nilai konsumsi jenis barang  $i$ , pada bulan dasar
- $K$  = banyaknya jenis barang paket komoditas dalam sub kelompok.

Sedangkan laju inflasi bulanan suatu kota dihitung dengan menggunakan rumus:

$$LI_n = \frac{I_n - I_{(n-1)}}{I_{(n-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

- $LI_n$  = Laju Inflasi bulan ke-  $n$
- $I_n$  = Indeks bulan ke-  $n$
- $I_{(n-1)}$  = Indeks bulan ke-  $(n-1)$

## 2.5. Statistik Harga Konsumen Perdesaan

Harga Konsumen Perdesaan meliputi harga berbagai komoditas baik makanan maupun non makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat perdesaan. Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah data harga konsumen untuk komoditas makanan dan non makan di daerah perdesaan selama tahun 2018 yang dirinci menurut bulan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan harga konsumen dari komoditas-komoditas tersebut.

Metode Pengumpulan Data Harga Konsumen Perdesaan dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) menggunakan daftar:

1. HKD-1 untuk mencatat harga-harga kebutuhan rumah tangga petani Kelompok Makanan di pedesaan
2. HKD-2.1 untuk mencatat harga-harga kebutuhan rumah tangga petani Kelompok Non Makanan (Konstruksi, jasa dan transportasi) di pedesaan
3. HKD-2.2 untuk mencatat harga-harga kebutuhan rumah tangga petani Kelompok Non Makanan (Aneka Perlengkapan Rumah Tangga dan Lainnya) di pedesaan

Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara langsung ke pedagang eceran yang berada di pasar perdesaan. Pencacahan dilakukan setiap bulan antara tanggal 10-14. Pencatatan harga setiap jenis komoditas atau kualitas/merk di masing-masing pasar dilakukan terhadap tiga atau empat pedagang. Harga yang dicatat dalam daftar HKD (HKD-1; HKD-2.1 dan HKD-2.2) merupakan harga yang terbanyak muncul (modus) atau rata-rata harga. Hasil pencatatan yang ada dalam daftar HKD tersebut selanjutnya dipindahkan ke register HKD. Setelah daftar harganya disalin, daftar HKD dikirim ke BPS Kabupaten, sedangkan register HKD disimpan KSK untuk membantu dalam mengisi harga bulan sebelumnya pada daftar HKD sebelum KSK melakukan pengumpulan data. Daftar HKD di entri di BPS Kabupaten kemudian hasil entri data tersebut dikirim ke BPS.

Sampel HKD di Kabupaten Sidoarjo 2018, kecamatan yang terpilih menjadi sampel adalah Kecamatan Waru dengan pemantauan harga di UPTD pasar Wadungasri; Kecamatan Tulangan di Pasar Tulangan; Kecamatan Prambon di Pasar Prambon.

### **Metode Penghitungan Rata-Rata Harga.**

Formula penghitungan rata-rata harga tiap komoditas di di masing-masing provinsi untuk Januari menggunakan rata-rata geometrik. Selanjutnya untuk penghitungan Februari sampai Desember menggunakan relatif harga, yaitu rata-rata geometrik dari rasio harga bulan bersangkutan dengan harga bulan sebelumnya. Bila menggunakan notasi matematika maka penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\bar{P}_{(Jan)} = \sqrt[n]{P_{(Jan)}i}$$

Dimana,

$\bar{P}_{(Jan)}$  = rata-rata harga Januari

$n$  = jumlah observasi

$i$  = Kecamatan ke -i

kemudian,

$$P_{jt} = P_{j(t-1)} \times \frac{RH_{j(t)}}{100}$$

Dimana,

$P_{jt}$  = Harga komoditas j pada bulan ke -t

t = Bulan ke-t

$$RH_{(t)j} = \sqrt[k]{\prod_{i=1}^k \left( \frac{P_{(t)ji}}{P_{(t-1)ji}} \right)}$$

dimana,

$RH_{(t)j}$  = Relatif harga komoditas ke-j untuk bulan ke -t

$P_{(t)ji}$  = Harga komoditas ke -j untuk bulan ke -t di kecamatan ke -i

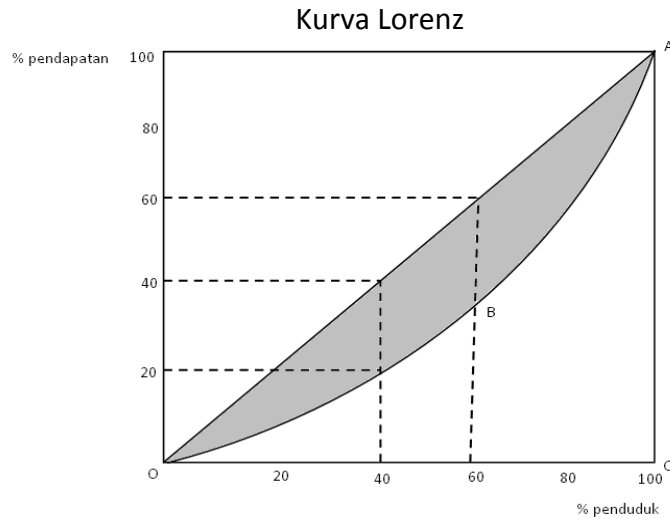
$P_{(t-1)ji}$  = Harga komoditas ke -j untuk bulan ke -(t-1) di kecamatan ke -i

## 2.6. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan apakah pendistribusian dari pendapatan merata secara nyata. Koefisien Gini merupakan rasio antara garis 45 derajat dengan Kurva Lorenz dan area dalam segitiga. Koefisien ini bernilai 0 (nol), jika distribusi menyebar merata secara nyata, dan mendekati 1 (satu), jika secara nyata menyebar tidak merata. Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, *tinggi* jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, *sedang* jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan *rendah* jika kurang dari 0,36.

Untuk mendapatkan Gini rasio, data yang digunakan adalah data rata-rata pengeluaran perkapita sebulan yang lalu dari hasil Susenas. Data tersebut diurutkan berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dari yang terendah sampai tertinggi. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan menjadi lima kelompok penduduk yang

jumlahnya sama besar, berdasarkan urutan tersebut. Kemudian dihitung persentase total pengeluaran untuk tiap kelompok. Dengan metode ini, selain dapat diperoleh Koefisien Gini, juga dapat diperoleh indikator distribusi pendapatan (pengeluaran) menurut Bank Dunia. Bentuk umum dari Kurva Lorenz yang menggambarkan antara kumulatif penduduk dengan kumulatif pengeluaran adalah seperti gambar berikut:



Data yang diperoleh kemudian dilakukan scatter plot, dengan terlebih dahulu mengkumulatikan total pengeluaran perkapita, sehingga akan diperoleh hasil plot seperti gambar 2.1. Formula untuk menghitung Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$\text{Gini Ratio} = \frac{\text{Luas daerah yang terletak di antara } OA \text{ dan } OAB}{\text{Seluruh daerah } OAO'}$$

Atau,

$$\text{Gini Ratio} = \sum_{k=1}^{n-1} C_{k+1}P_k - \sum_{k=1}^{n-1} C_kP_{k+1}$$

Dimana,

$C$  = Persentase kumulatif konsumsi,

$P$  = Persentase kumulatif penduduk,

$k$  = Kelompok kelas ke- (1,2,3,...,n).

Dari gambar di atas, sumbu horisontal menggambarkan prosentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang

diterima oleh masing-masing prosentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut “garis pemerataan sempurna”. Karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan prosentase penduduk yang sama dengan prosentase penerimaan pendapatan.

Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. Perhatikan tabel berikut:

### Patokan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
<0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4-0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

## 2.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kebijakan politik desentralisasi yang ditandai dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan hak otonomi bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah diserahkan kepada pemerintah daerah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, pendidikan, moneter dan fiskal.

Pemerintahan daerah juga diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya melalui UU No. 33 Tahun 2004 serta disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Proses penetapan APBD dilakukan oleh kepala daerah dengan



persetujuan dari DPRD dan diberlakukan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

APBD yang direncanakan setiap tahun pada dasarnya menunjukkan dari mana sumber-sumber Pendapatan Daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit. Struktur APBD berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Keuangan Daerah, terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

APBD tidak hanya sekedar rencana keuangan daerah, tetapi juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang mencerminkan bagaimana arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang harus dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat serta didistribusikan secara patut dan adil. Pelaksanaan pelayanan publik di daerah sangat berkaitan erat dengan kebijakan Belanja Daerah. Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Aktivitas pembangunan dan pemerintahan di daerah dapat dilihat dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Struktur APBD akan mampu memperlihatkan keseriusan suatu pemerintah daerah dalam mengelolakeuangan daerah mulai dari besaran potensi penerimaan yang akan digali, ke arah mana belanja daerah itu difokuskan atau dari mana defisit anggaran akan dibiayai. Dari struktur dan porsibelanja daerah dapat diketahui kecenderungan belanja daerah, apakah cenderung padapenyelenggaraan pemerintahan dan aparatur pemerintahan atau cenderung pada penyelenggaraanpembangunan daerah<sup>1</sup>.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menganalisis keefektifan dari program pembangunan pemerintah termasuk pemerintah daerah adalah melalui besaran rasio belanja pegawai terhadap total APBD. Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakintinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD

---

<sup>1</sup>Mochamad Fajar Hidayat, Ghozali Maski, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur), Jurnal Ilmiah, Tahun 2013.

yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai.

Belanja pegawai yang dihitung dalam rasio ini meliputi belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. Belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja pegawai secara implisit memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut hanya menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain belanja pegawainya. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah di luar belanja pegawai yang bisa didanai, khususnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

## 2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

UNDP merekomendasikan tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara secara minimal dapat direfleksikan dengan tingkat pemenuhan tiga dimensi dasar, yaitu:

1) Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*)

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age 0*:  $e_0$ )

2) Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

a. Harapan Lama Sekolah (HLS)

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

3) Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Formula untuk menghitung angka IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}}$$

Dimana,

$$\diamond I_{kesehatan} = \frac{e_0 - e_{0 \min}}{e_{0 \max} - e_{0 \min}}$$

$I_{\text{kesehatan}}$	=	Indeks Kesehatan
$e_0$	=	Angka harapan hidup
$e_{0 \text{ min}}$	=	Angka harapan hidup minimal
$e_{0 \text{ maks}}$	=	Angka harapan hidup maksimal

$$\diamond I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{EYS} + I_{MYS}}{2}$$

$I_{\text{pengetahuan}}$	=	Indeks Pengetahuan/ Pendidikan
$I_{EYS}$	=	Indeks Angka Harapan Sekolah
$I_{MYS}$	=	Indeks Rata-rata Lama Sekolah

$$\diamond \text{PPP}_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

$p_{ij}$  : harga komoditas  $i$  di kab/kota  $j$   
 $p_{ik}$  : harga komoditas  $i$  di Jakarta Selatan  
 $m$  : jumlah komoditas

$p_{ik}$	=	harga komoditas $i$ di Jakarta Selatan
$p_{ij}$	=	harga komoditas $i$ di kab/kota $j$
$m$	=	jumlah komoditas

**BAB III**  
**INDIKATOR PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI**

**3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 - 2018**

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidoarjo terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masing-masing sebesar; 131,64 trilyun rupiah (2014), 146,08 trilyun rupiah (2015), 160,020 trilyun rupiah (2016), 174,280 trilyun rupiah (2017) dan 189,282 trilyun rupiah (2018).

**Tabel 3.1.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo**  
**Atas Dasar Harga Berlaku 2016 – 2018 (milyar rupiah)**

Kategori	Uraian	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,817,558	4,055,643	4,104,556
B	Pertambangan dan Penggalian	141,810	159,920	188,896
C	Industri Pengolahan	73,612,756	80,314,623	88,235,201
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,727,112	1,798,007	1,725,649
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	104,511	112,907	118,582
F	Konstruksi	14,631,053	16,006,572	17,134,287
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,623,447	28,139,685	30,852,778
H	Transportasi dan Pergudangan	19,623,165	21,275,284	22,748,342
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,453,141	6,013,346	6,500,807
J	Informasi dan Komunikasi	5,588,595	6,094,635	6,467,922
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,053,166	2,183,944	2,337,091
L	Real Estate	1,461,789	1,564,212	1,728,338
M,N	Jasa Perusahaan	253,009	275,387	306,147
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,942,523	3,113,756	3,438,186
P	Jasa Pendidikan	1,913,688	2,024,851	2,163,665
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	492,318	553,990	568,776
R,S,T,U	Jasa lainnya	581,013	613,326	662,779
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>160,020,653</b>	<b>174,280,088</b>	<b>189,282,001</b>

Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masing-masing sebesar; 106,43 trilyun rupiah (2014), 112,01 trilyun rupiah (2015), 118,18 trilyun rupiah (2016), 125,04 trilyun rupiah (2017) dan 132,60 trilyun rupiah (2018).

**Tabel 3.2.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2016 – 2018 (milyar rupiah)**

Kategori	Uraian	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,604,216	2,654,505	2,551,740
B	Pertambangan dan Penggalian	146,552	151,053	154,190
C	Industri Pengolahan	58,274,852	61,596,911	65,982,674
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,123,397	1,148,320	1,074,401
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	90,929	96,740	100,726
F	Konstruksi	10,777,948	11,538,529	12,240,071
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,059,370	20,271,722	21,439,523
H	Transportasi dan Pergudangan	9,833,803	10,401,337	10,880,777
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,023,275	4,344,218	4,649,960
J	Informasi dan Komunikasi	5,132,599	5,494,448	5,826,312
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,446,720	1,490,045	1,552,616
L	Real Estate	1,154,478	1,198,695	1,271,815
M,N	Jasa Perusahaan	187,339	197,606	210,904
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,070,543	2,118,373	2,205,650
P	Jasa Pendidikan	1,405,821	1,451,229	1,525,096
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	387,725	407,266	432,802
R,S,T,U	Jasa lainnya	459,623	478,061	499,717
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>118,179,189.9</b>	<b>125,039,056.4</b>	<b>132,598,972.6</b>

Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo.

### 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2018

PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat. Peningkatan nilai PDRB ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Peningkatan PDRB tersebut tentunya belum bisa menggambarkan pertumbuhan perekonomian secara riil, mengingat nilai PDRB atas dasar harga berlaku tersebut masih mengandung pengaruh perubahan harga. Untuk melihat pertumbuhan riil di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (tahun dasar 2010), dimana pertumbuhan ekonomi ini sudah bebas dari pengaruh perubahan harga (pertumbuhan yang benar-benar diakibatkan dari adanya perubahan jumlah nilai produk barang dan jasa).

Tabel 3.3.  
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha  
Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2015 – 2018 (persen)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.69	3.78	1.93	-3.87
B	Pertambangan dan Penggalian	-8.24	5.24	3.07	2.08
C	Industri Pengolahan	5.69	4.52	5.70	7.12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-3.25	-1.88	2.22	-6.44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.19	4.06	6.39	4.12
F	Konstruksi	3.66	6.25	7.06	6.08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.64	6.25	6.36	5.76
H	Transportasi dan Pergudangan	5.27	7.47	5.77	4.61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.08	8.89	7.98	7.04
J	Informasi dan Komunikasi	6.88	8.19	7.05	6.04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.99	7.36	2.99	4.20
L	Real Estate	5.74	6.91	3.83	6.10
M,N	Jasa Perusahaan	5.05	5.47	5.48	6.73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.11	4.92	2.31	4.12
P	Jasa Pendidikan	7.21	6.13	3.23	5.09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.09	5.86	5.04	6.27
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.07	5.62	4.01	4.53
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,24</b>	<b>5,51</b>	<b>5,80</b>	<b>6,05</b>

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang dihitung dari PDRB merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Apabila sebuah sektor memiliki kontribusi besar dan pertumbuhannya lambat maka hal ini akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap totalitas perekonomian tersebut mampu mencapai pertumbuhan tinggi, maka sektor tersebut secara otomatis akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara total.

Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar 6,05 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,58 persen. Iklim ekonomi mulai membaik di Sidoarjo didukung stabilitas perekonomian nasional yang baik dan inflasi yang rendah di Jawa Timur dan nasional.

Pertumbuhan ekonomi Sidoarjo selama 2018 dipercepat oleh akselerasi kinerja lapangan usaha industri pengolahan yang didukung adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan tol, bangunan serta perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya. Capaian pertumbuhan ekonomi Sidoarjo dipercepat pula oleh kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Kegiatan lapangan usaha ini didorong oleh aktivitas hotel dan penginapan yang semakin ramai. Begitu pula kegiatan makan-minum di restoran, warung makan dan kedai yang tidak pernah sepi.

Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang tinggi tertahan oleh perlambatan kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Tertahannya kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo juga dipengaruhi oleh kontraksi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Posisi geografis Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh positif pada perkembangan kegiatan ekonomi di daerah ini. Mobilitas penduduk dan juga sentra-sentra ekonomi yang sudah relatif terlalu padat di Surabaya menuju daerah sekitar Surabaya termasuk Kabupaten

Sidoarjo semakin mempercepat perkembangan perekonomian yang ada. Perkembangan sektor properti, pengembangan lokasi industri serta sentra perdagangan di daerah ini tentunya tidak terlepas dari semakin besarnya potensi pasar yang ada di Sidoarjo.

Pertumbuhan lapangan usaha industri sebagai lokomotif pembangunan di Sidoarjo sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional. Di lapangan usaha industri, pembentukan nilai tambah pada kategori ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan industri berskala besar dan sedang yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 20 orang. Sedangkan menjamurnya industri mikro dan kecil (UMKM), kerajinan dan rumah tangga yang mampu memberdayakan tenaga kerja dari daerah setempat, mencapai kurang dari 10 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai angka 7 persen dicapai oleh 2 lapangan usaha, yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 7,12 persen dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,04 persen.

Pertumbuhan yang tinggi pada lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2018 didorong akselerasi kinerja industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman serta industri logam dasar. Masing-masing sub kategori tadi mampu tumbuh di atas 8 persen.

Sedangkan akselerasi kinerja lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum didorong kinerja sub kategori penyediaan makan dan minum yang mampu tumbuh 7 persen dan diiringi kinerja sub kategori penyediaan akomodasi yang tumbuh sebesar 6,4 persen.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif; hanya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 hingga 10 persen. Sedangkan delapan lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari 5 persen.



Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 hingga 10 persen tersebut antara lain: lapangan usaha Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Konstruksi sebesar 6,08 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,36 persen; Informasi dan Komunikasi 6,04 persen; Real Estate sebesar 6,10 persen; Jasa Perusahaan sebesar 6,73 persen; Jasa Pendidikan sebesar 5,09 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,27 persen.

Sedangkan enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 4,53 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,12 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,20 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,61 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,08 persen dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,12 persen.

Pada 2 lapangan usaha mengalami kontraksi, yaitu Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami kontraksi sebesar 3,87 persen dan Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami kontraksi sebesar 6,44 persen.

Kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tahun 2018 melambat dari tahun sebelumnya, tetapi pertumbuhan masih terjaga di atas 5 persen. Berdirinya beberapa sentra perdagangan dan juga semakin banyaknya lokasi perumahan baru menjadi penggerak munculnya usaha perdagangan baru untuk memenuhi permintaan pasar yang masih cukup tinggi. Lapangan usaha perdagangan dan restoran diperkirakan akan tumbuh pesat selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Dari data Sensus Ekonomi 2016 tercatat bahwa jumlah kegiatan usaha di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor lebih dari ini lebih dari 76 ribu unit usaha. Sedangkan unit usaha lapangan usaha akomodasi makan dan minum mencapai 36 ribu usaha. Dibanding jumlah penduduk saat ini (2,22 juta jiwa), dan pertumbuhan penduduk 1,52 persen per tahun, diharapkan kedua sub sektor ini akan mampu menjadi motor penggerak perekonomian di Sidoarjo pada masa mendatang. Disamping memiliki pasar

yang potensial bagi produk barang dan jasa di tingkat lokal, ekspor Sidoarjo ke luar negeri selama 5 tahun terakhir juga selalu terjaga di atas US\$ 1 milyar.

Jika kondisi perekonomian berjalan normal, sektor tersier yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 7-9 persen per tahun, dalam waktu sekitar 5 tahun akan mampu melampaui peranan sektor sekunder yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 4-5 persen per tahun.

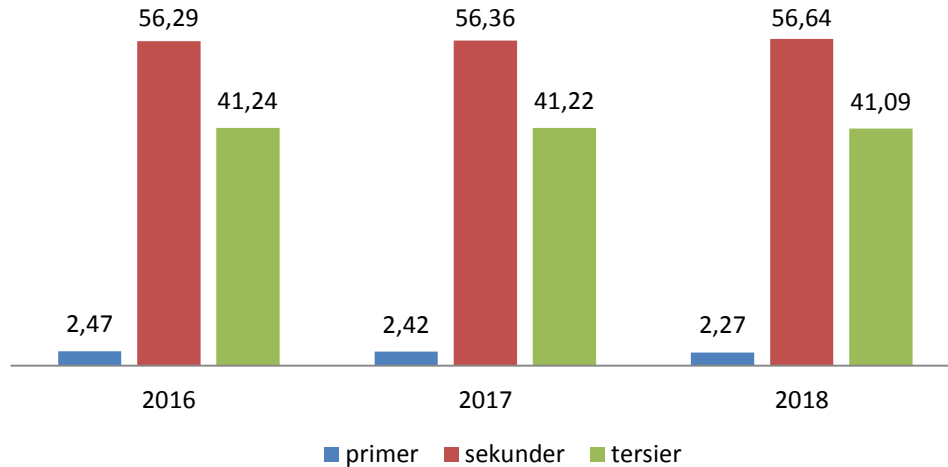
### 3.3. Struktur Perekonomian

Aktivitas pembangunan khususnya bidang ekonomi di Kabupaten Sidoarjo telah mengalami pergeseran struktur dari sektor primer ke arah sektor sekunder dan tersier. Pada sektor primer, kontribusinya dalam mendukung perekonomian Sidoarjo selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB stabil di bawah 3 persen. Penurunan peranan sektoral ini disebabkan oleh karena kedua lapangan usaha yang tergabung dalam kelompok ini, secara bersamaan mengalami penurunan kontribusinya terhadap Total PDRB (Pertanian dan Pertambangan/ Penggalian).

Selama 3 tahun terakhir, kontribusi sektor sekunder stabil, berada pada kisaran 56 persen. Lapangan usaha industri sebagai penentu sektor sekunder, stabil dengan kontribusi sekitar 46 persen terhadap total PDRB. Begitu pula kontribusi sektor tersier, berada pada kisaran 41 persen. Perkembangan yang pesat dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan sangat membantu kemajuan sektor ini. Lapangan usaha transportasi di Sidoarjo didominasi oleh angkutan udara.

Peran kelompok sektor *primer* (pertanian, pertambangan dan penggalian) di Kabupaten Sidoarjo relatif kecil dibanding dengan sektor *sekunder* dan sektor *tersier*. Adanya konversi dari lahan produktif menjadi perumahan maupun lokasi industri baru akan lebih mendorong semakin rendahnya kontribusi kelompok ini terhadap total PDRB Kabupaten Sidoarjo. Ke depan struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo akan semakin bergeser pada kelompok sektor *sekunder* maupun *tersier*.

**Grafik 3.1.**  
**Perbandingan Sektoral PDRB Kabupaten Sidoarjo**  
**Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2016 – 2018**



Peran kelompok sektor *primer* dalam mendukung perekonomian Sidoarjo selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Kontribusi sektor *primer* berkisar 2-3 persen per tahunnya.

Peran kelompok sektor *sekunder* sangat tinggi (56 persen) terhadap total PDRB Kabupaten Sidoarjo. Peran terbesar ataupun penyumbang nilai tambah terbesar berada pada sub sektor Industri Pengolahan. Pada tahun 2018, sektor industri pengolahan mampu berkontribusi sebesar 46,62 persen terhadap Total PDRB, sehingga naik-turunnya kegiatan ekonomi di sektor ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

Kontribusi sektor *tersier* mulai beranjak naik terhadap total PDRB Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi sektor ini lebih dari 40 persen di tahun 2018. Perkembangan yang pesat dari lapangan usaha transportasi dan perdagangan sangat membantu kemajuan sektor ini. Lapangan usaha transportasi di Sidoarjo didominasi oleh angkutan udara. Keberadaan Bandara Juanda sebagai bandara internasional yang semakin padat aktivitasnya turut mendongkrak peran di sektor ini.

Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.4.  
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha  
Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2015 – 2018 (persen)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,44	2,39	2,33	2,17
B	Pertambangan dan Penggalian	0,10	0,09	0,09	0,10
C	Industri Pengolahan	46,93	46,00	46,08	46,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,17	1,08	1,03	0,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06
F	Konstruksi	9,06	9,14	9,18	9,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,78	16,01	16,15	16,30
H	Transportasi dan Pergudangan	11,70	12,26	12,21	12,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,26	3,41	3,45	3,43
J	Informasi dan Komunikasi	3,45	3,49	3,50	3,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,26	1,28	1,25	1,23
L	Real Estate	0,91	0,91	0,90	0,91
M,N	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,16	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,83	1,84	1,79	1,82
P	Jasa Pendidikan	1,21	1,20	1,16	1,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,31	0,31	0,31	0,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,37	0,36	0,35	0,35
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 46,62 persen (meningkat dari 46,08 persen di tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,30 persen (naik dari 16,15

persen di tahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,02 persen (turun dari 12,21 persen di tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,05 persen (turun dari 9,18 persen di tahun 2017) dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,43 persen (turun dari 3,45 persen di tahun 2017).

Bagaimanapun juga lapangan usaha industri tetap menjadi penyumbang *value added* yang terbesar, karena Kabupaten Sidoarjo merupakan kota industri kedua setelah Kota Surabaya yang juga merupakan ring pertama dalam sistim pengupahan termasuk Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Naik-turunnya kegiatan ekonomi di lapangan usaha ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

### **3.4. PDRB Perkapita**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tidak bisa secara langsung diartikan meningkat pula kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Dampak pertumbuhan ekonomi tersebut harus bisa dipastikan dinikmati oleh seluruh masyarakat daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan relatif kurang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat jika pertumbuhan jumlah penduduk juga tinggi. Salah satu indikator yang dianggap bisa lebih menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut adalah PDRB perkapita/Pendapatan perkapita.

Dengan definisi PDRB perkapita adalah total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dianggap bahwa tiap penduduk juga ikut merasakan peningkatan atau hasil pertumbuhan jika terjadi peningkatan PDRB perkapita di suatu daerah.

Biasanya semakin tinggi nilai PDRB per kapita dan Pendapatan Regional per kapita, semakin baik pula kondisi perekonomian di wilayah tersebut, meskipun sebenarnya ukuran tersebut belum bisa memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Hal ini disebabkan dari seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan di suatu wilayah, belum tentu seluruhnya dinikmati oleh penduduk di wilayah yang bersangkutan.

Dari data 5 tahun terakhir, terlihat bahwa peningkatan besaran PDRB masih selalu diikuti dengan kenaikan PDRB per kapita nya. Pada periode 4 tahun terakhir, PDRB Sidoarjo

adalah 146,08 triliun rupiah (2015); 160,02 triliun rupiah (2016); 174,28 triliun rupiah (2017) dan 189,28 triliun rupiah (2018). Sedangkan PDRB perkapita nya mencapai 68,99 juta rupiah (2015); 74,41 juta rupiah (2016); 79,81 juta rupiah (2017) dan 85,38 juta rupiah (2018). kenaikan besaran PDRB dan PDRB per kapita tiap tahun ini ternyata seiring dengan kenaikan Pendapatan Regional Perkapita (Tabel 3.5).

**Tabel 3.5.**  
**Perbandingan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHB)**  
**Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2014-2018**

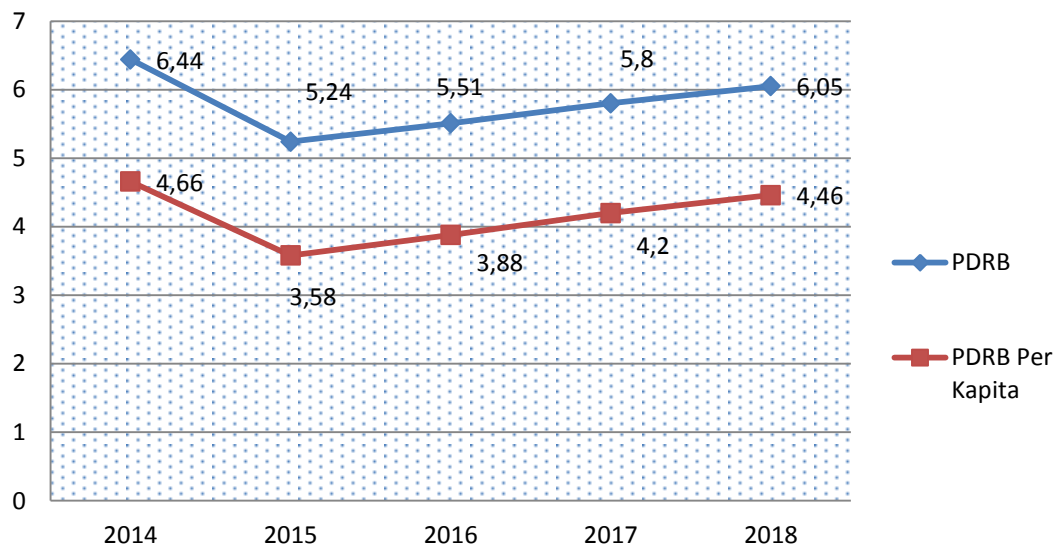
Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2014	2015	2016	2017	2018
- ADHB/ at current price	131.646	146.081	160.021	174.280	189.282
- ADHK/ at 2010 Constant Price	106.434	112.013	118.179	125.039	132.599
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	63.172	68.995	74.412	79.810	85.385
- ADHK/ at 2010 Constant Price	51.074	52.904	54.955	57.261	59.815
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	4,66	3,58	3,88	4,20	4,46
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ <i>Population (Thousand People)</i>	2.084	2.117	2.150	2.184	2.217
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ <i>Population Growth (Percent)</i>	1,71	1,60	1,57	1,54	1,52

Dari sisi PDRB atas harga konstan, bisa dilihat bahwa ternyata meskipun besaran PDRB meningkat beriringan dengan PDRB perkapita namun tingkat kenaikannya tidaklah sama. Jika selama 2015-2018, total PDRB mampu mencapai pertumbuhan antara 5,24 – 6,05 persen; maka pada periode yang sama, PDRB perkapita hanya mampu tumbuh antara 3,58 – 4,46 persen.

Pertumbuhan PDRB per kapita tersebut bisa lebih tinggi seandainya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo bisa ditekan lebih rendah lagi. Namun faktanya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir masih mencapai

1,5 persen/tahun. Pertumbuhan penduduk sebesar itu lebih disebabkan oleh arus migrasi masuk, dari pada akibat pertumbuhan alamiah (lahir-mati).

**Grafik 3.2.**  
**Perbandingan Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHK)**  
**Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2014-2018**  
**(persen)**



### 3.5. Laju Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Penghitungan inflasi Sidoarjo didasarkan pada hasil pemantauan/ pendataan harga barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada pasar tradisional dan pasar modern di wilayah Sidoarjo. Komoditas yang dipantau harganya sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) komoditi. Dari hasil pendataan tersebut diperoleh data bahwa sampai akhir tahun 2018, secara kumulatif Sidoarjo mengalami inflasi sebesar 2.70 persen (lebih rendah dibanding inflasi kumulatif pada tahun 2017 yaitu sebesar 4.11 persen).

Inflasi pada periode ini, dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Presiden Joko Widodo. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang

penyesuaian harga BBM, penyesuaian ini dilakukan sebanyak 6 kali dalam setahun dengan alasan menyesuaikan harga minyak dunia.

Apabila disandingkan inflasi kumulatif Jawa Timur (2,86 persen), maka inflasi Sidoarjo tahun 2018 sedikit lebih rendah. Inflasi Kabupaten Sidoarjo menduduki peringkat ke 6 (enam) inflasi terbesar dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 3.6.**  
**Inflasi Kumulatif 9 Kabupaten/Kota dan Jawa Timur**  
**Tahun 2018**

Kabupaten/Kota	BULAN											
	Jan.	Peb.	Mart.	Aprl.	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
<b>1 SIDOARJO</b>	<b>0,60</b>	<b>0,76</b>	<b>0,80</b>	<b>0,95</b>	<b>1,13</b>	<b>1,59</b>	<b>1,66</b>	<b>1,70</b>	<b>1,69</b>	<b>1,86</b>	<b>2,08</b>	<b>2,70</b>
2 JEMBER	0,56	0,74	0,66	1,06	1,32	2,06	1,98	1,97	1,92	2,17	2,44	2,95
3 BANYUWANGI	0,70	0,86	0,98	1,02	1,15	1,65	1,69	1,64	1,14	1,23	1,49	2,04
4 SUMENEP	0,64	0,72	0,73	0,71	1,01	1,86	1,93	1,73	1,75	2,05	2,30	2,82
5 KEDIRI	0,14	0,40	0,50	0,65	0,47	0,91	1,00	0,90	1,10	1,27	1,67	1,97
6 MALANG	0,69	0,86	0,98	1,13	1,43	1,68	1,89	1,95	1,62	1,93	2,31	2,98
7 PROBOLINGGO	0,29	0,60	0,46	0,68	0,77	1,51	1,57	1,22	0,90	1,09	1,45	2,18
8 MADIUN	0,62	0,87	0,89	1,11	1,23	1,97	2,14	2,05	1,93	2,11	2,45	2,71
9 SURABAYA	0,63	0,77	0,83	1,03	1,20	1,58	1,61	1,84	2,00	2,15	2,36	3,03
<b>JAWA TIMUR</b>	<b>0,62</b>	<b>0,77</b>	<b>0,82</b>	<b>1,01</b>	<b>1,18</b>	<b>1,61</b>	<b>1,68</b>	<b>1,79</b>	<b>1,78</b>	<b>1,97</b>	<b>2,24</b>	<b>2,86</b>



**Tabel 3.7.**  
**Laju Inflasi dan Andil Inflasi Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2018**  
**(Periode Januari-Desember 2018)**

No.	Kelompok Jenis Barang/Jasa	Inflasi %	Andil %
1	2	3	4
	<b><i>Umum</i></b>	<b>2.70</b>	
1	Bahan Makanan	2.99	0.58
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	2.21	0.36
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	3.10	0.82
4	Sandang	1.48	0.08
5	Kesehatan	3.15	0.18
6	Pendidikan, Rekreasi Dan Olah Raga	-0.36	-0.03
7	Transportasi, Komunikasi Dan Jasa Keuangan	4.17	0.70

Jika diperhatikan dari tabel di atas terlihat bahwa kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memiliki andil yang cukup besar jika dibandingkan dengan kelompok kesehatan meskipun perubahan harga di kelompok kesehatan lebih besar, hal ini menunjukkan bahwa bobot pengeluaran untuk kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau lebih tinggi.

Selama tahun 2018 besarnya laju inflasi Kabupaten Sidoarjo menurut kelompok pengeluaran sebagai berikut: kelompok transportasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 4.17 persen; kelompok kesehatan sebesar 3.15 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 3.10 persen; kelompok bahan makanan sebesar 2.99 persen; kelompok makanan jadi, minuman dan rokok sebesar 2.21 persen; kelompok sandang sebesar 1.48 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar -0.36 persen.

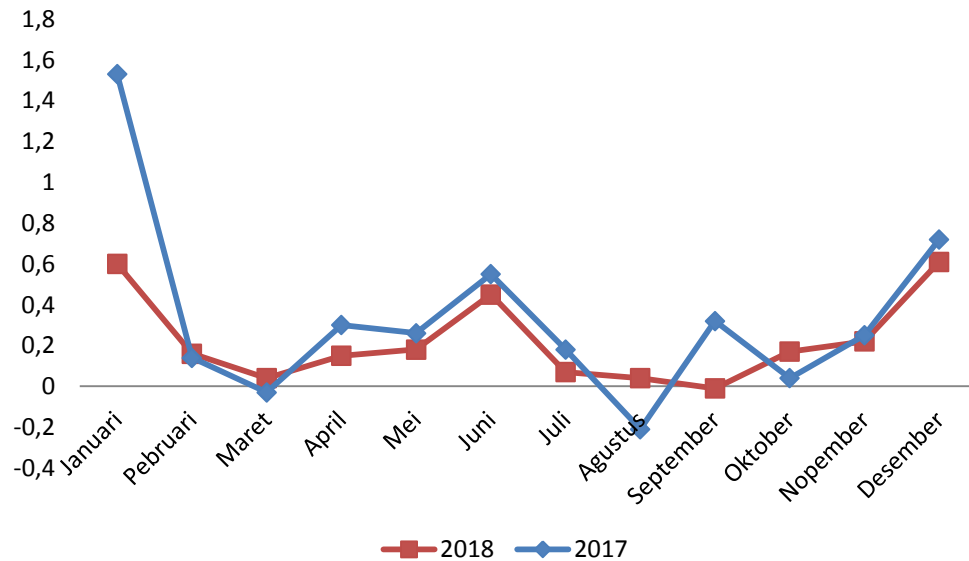
Selama tahun 2018 kelompok bahan makanan mengalami perubahan harga tertinggi. Hal keadaan ini dipicu oleh kenaikan dan perubahan harga beberapa komoditas yang dominan dikonsumsi oleh masyarakat Sidoarjo seperti beras, garam, ikan bandeng, ikan mujair, daging ayam ras, bumbu-bumbuan, buah-buahan.

Peningkatan tekanan inflasi juga dominan terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Inflasi yang terjadi pada sektor transportasi ditentukan oleh kenaikan harga BBM. Kebijakan perubahan harga BBM yang dikeluarkan pemerintah, dilakukan secara bertahap selama 6 kali. Kebijakan ini merupakan imbas dari kenaikan harga minyak dunia. Pada sisi yang lain, tekanan inflasi juga disumbang oleh keberadaan Bandara Juanda, yang merupakan pusat transportasi udara di Kabupaten Sidoarjo. Sepanjang tahun 2018 kenaikan harga tiket angkutan udara juga dipengaruhi oleh tingginya harga avtur.

Sedangkan andil inflasi tiap kelompok sebagai berikut : kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0.82 persen; kelompok transportasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0.70 persen; kelompok bahan makanan sebesar 0.58 persen; kelompok makanan jadi, minuman dan rokok sebesar 0.36 persen; kelompok kesehatan sebesar 0.18 persen; kelompok sandang sebesar 0.08 persen dan kelompok pendidikan rekreasi dan olah raga sebesar -0.03 persen.

Dari grafik 3.3. berikut dapat dilihat pergerakan inflasi bulanan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2018. Selama tahun 2018, Kabupaten Sidoarjo mengalami inflasi tertinggi pada bulan Januari dan Desember 2018 sebesar 0.60 persen dan 0.61 persen. Bulan Januari dan Desember merupakan bulan yang sibuk dengan kegiatan akhir tahun bersamaan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Permintaan akan bahan makanan meningkat, terutama ikan seperti mujair dan bandeng. Angkutan udara dan tarif kereta api di Desember 2018 juga mengalami kenaikan harga disebabkan tingginya permintaan karena hari libur sekolah dan liburan panjang natal dan tahun baru. Kenaikan harga tiket angkutan udara biasanya bertahan beberapa bulan setelah tahun baru.

**Grafik 3.3.**  
**Perkembangan Inflasi Bulanan Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2017 - 2018**



Sementara pada bulan Juni (bertepatan hari raya Idul Fitri) yang biasanya mengalami inflasi tinggi hanya mengalami inflasi 0.45 persen (tertinggi no 3 setelah bulan Januari dan Desember 2018). Pada bulan Juni kenaikan harga dipicu oleh maraknya Hari Raya Idul Fitri 1439 H yang beriringan dengan kenaikan tarif transportasi. Secara rata-rata angkutan transportasi mengalami kenaikan paling tinggi 30 persen. Sementara kenaikan untuk beberapa komoditas di kelompok bahan makanan disebabkan oleh tingginya permintaan sementara stok yang ada dipasar mengalami penurunan dikarenakan banyak para pedagang yang mudik.

Inflasi terendah selama tahun 2018 terjadi pada bulan September yaitu -0,01 persen. Deflasi yang terjadi pada bulan ini dipicu oleh melimpahkan hasil panen komoditas bumbu-bumbuan yang tidak sepenuhnya dikonsumsi karena lesunya permintaan di pasar. Penurunan permintaan akan angkutan udara di bulan September menyebabkan harga tiket yang diberlakukan adalah batas bawah. Sedangkan komoditas emas mengalami kenaikan harga disebabkan harga dasar emas berpatokan dengan harga emas Antam yang dinilai dengan dolar amerika. Adapun bulan September nilai dolar Amerika terhadap rupiah terus merangkak naik mencapai Rp.14.835/US\$.

### **3.6. Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kabupaten Sidoarjo 2018**

#### **A. Kelompok Makanan**

Secara umum, harga eceran di perdesaan untuk konsumsi makanan selama tahun 2018 cenderung stabil antar bulannya. Terlihat beberapa komoditas mengalami kenaikan harga di pertengahan tahun dan di dua bulan terakhir. Beberapa komoditas yang mengalami fluktuatif harga adalah beras, bumbu-bumbuan yaitu bawang merah bawang putih. Selain itu ada komoditas yang harganya cenderung stabil seperti telur ayam ras, daging sapi, daging ayam ras. Sementara untuk komoditas gula selama tahun 2018 mengalami penurunan harga sampai di akhir tahun berada pada rata-rata harga Rp. 11.040 per kg. Selama tahun 2018 Pemerintah kerap melaksanakan impor bahan pangan seperti beras dan gula.

Fluktuasi harga beras selama tahun 2018 sangat signifikan. Di bulan Mei sampai Juli saat masa panen dan Hari Raya Idul Fitri harga beras cenderung turun dan kembali mengalami kenaikan pada bulan September hingga Desember 2018. Sementara komoditas gula dari bulan Januari 2018 berada pada rata-rata harga Rp. 11.600/kg hingga di Bulan April harga tertinggi untuk komoditas gula yaitu mencapai Rp. 11.800/kg. Namun setelah bulan Juli secara signifikan harga gula turun sampai akhir tahun 2018 mencapai rata-rata Rp. 11.000/kg. Dua keadaan tersebut dimungkinkan karena efek dari kebijakan impor oleh Pemerintah. Rendahnya harga jual komoditas akibat berlebihnya stok karena impor menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat. Keadaan ini perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah untuk dapat menjaga kestabilan stok beras di pasar sehingga harga beras tidak terus melonjak.

Selain itu untuk komoditas bumbu-bumbuan seperti bawang merah dan bawang putih harganya juga berfluktuatif selama tahun 2018 sama halnya untuk komoditas sayur mayur selama tahun 2018 harga cenderung berfluktuatif dan berada di harga rendah pada bulan puasa dan Idul Fitri. Komoditas selanjutnya adalah bawang merah dan bawang putih merupakan tanaman yang sangat dipengaruhi musim sehingga fluktuasi harga untuk komoditas tersebut seringkali mencolok dan sangat bervariasi. Selama tahun 2018 di

Kabupaten Sidoarjo harga pedesaan untuk komoditas bawang merah mengalami harga tertinggi pada bulan Mei 2018, yaitu sebesar Rp 28.500 per kg dan bawang putih terjadi pada Maret yaitu sebesar Rp 28.333 per kg. Sedangkan harga terendah untuk bawang merah terjadi pada September yaitu sebesar Rp 14.750 per kg dan bawang putih terjadi pada September yaitu sebesar Rp 18.000 per kg.

Rata-rata harga bawang merah dan bawang putih di pedesaan cenderung mengalami penurunan pada semester akhir di tahun 2018. Walaupun demikian komoditas bawang putih pada bulan Maret sempat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan yaitu mencapai Rp. 28.333/kg sementara harga bawang merah signifikan mengalami kenaikan harga pada bulan Mei mencapai Rp. 28.500/kg. Sementara untuk komoditas yang sama berada di level harga terendah pada bulan September yaitu mencapai Rp. 18.000/kg bawang putih dan Rp. 14.750/kg bawang merah, keadaan ini dimungkinkan karena perubahan stok bawang putih di pasaran. Untuk komoditas bawang merah perubahan harga yang terjadi dimungkinkan karena perubahan cuaca dan masa musim panen, jika memasuki musim panen harga bawang merah cenderung turun karena stok yang ada berlimpah. Harga akan mulai meroket jika persediaan di petani dan pasar menipis.

Sementara untuk komoditas daging ayam ras dan daging sapi di tahun 2018 harganya relatif stabil yaitu daging ayam ras berkisar Rp. 33.000/kg dan daging sapi berkisar Rp. 97.000/kg. Keadaan ini menunjukkan distribusi barang tersebut cukup lancar sampai pasar-pasar di pedesaan meskipun di hari raya lebaran, natal dan tahun baru.

Komoditas bahan pokok lain yang cukup stabil harganya di tahun 2018 adalah telur ayam ras. Di tahun 2018 harga yang terjadi berkisar antara Rp. 19.667/kg sampai Rp. 25.000/kg lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu berkisar Rp. 17.833/kg sampai Rp 22.333/kg.

### **B. Kelompok Non Makanan**

Secara umum, di Kabupaten Sidoarjo harga eceran pedesaan untuk konsumsi non makanan pada 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun,

ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga maupun stabil. Perkembangan harga beberapa jenis barang di kelompok non makanan selama tahun 2018, sebagai berikut: semen merupakan salah satu bahan material yang paling dominan digunakan, sehingga komoditas tersebut tidak luput dari pengawasan pemerintah. Selama tahun 2018 harga semen di pedesaan cenderung stabil berkisar Rp. 50.000/zak (50 Kg). Komoditas non makanan lain yang cukup bergerak di tahun 2018 adalah pasir, karena komoditas ini sempat mengalami penurunan harga tiga bulan terakhir disebabkan rendahnya permintaan di daerah pedesaan dimungkinkan lesunya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Angkutan transportasi darat luar kota maupun dalam kota merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat pedesaan sehari-hari di Kabupaten Sidoarjo. Secara umum, pada 2018 rata-rata tarif angkutan dalam kota stabil mencapai Rp 7.750 per orang naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6.917 per orang. Sementara angkutan luar kota tarif rata-rata selama tahun 2018 sebesar Rp 60.000 per orang. Demikian juga dengan komoditas bahan bakar minyak (BBM) salah satu komoditas strategis yang selalu dipantau oleh pemerintah selama tahun 2018, BBM bersubsidi premium harganya stabil di Rp 6.550 per liter. Sementara BBM non subsidi yaitu pertalite, pertamaks dan solar selama tahun 2018 beberapa kali mengalami kenaikan harga pada bulan Februari, Maret, Juli dan Oktober. Kenaikan harga BBM adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat dikarenakan penyesuaian dengan harga minyak dunia.

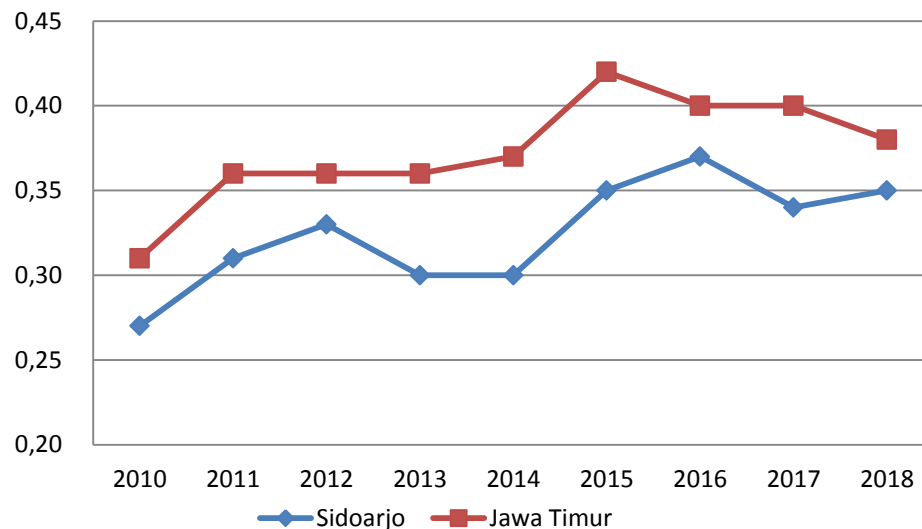
harga di pedesaan untuk komoditas yang tidak masuk kebijakan impor harganya cenderung berfluktuatif sementara komoditas dengan kebijakan impor harganya stabil. Keadaan ini bisa berakibat baik maupun buruk. Berakibat baiknya adalah harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun akibat buruknya produksi lokal akan kalah bersaing dengan produk impor karena harga yang jauh lebih murah untuk produk impor.

## 3.7. Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara langsung memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan. Hasil pembangunan harus mampu secara “merata” dinikmati oleh seluruh penduduk di daerah tersebut. Diperlukan kebijakan untuk penyiapan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi agar mampu berkompetisi pada pasar kerja yang tersedia diharapkan akan mengurangi kesenjangan terhadap distribusi hasil pembangunan yang ada. Salah satu indikator yang dianggap bisa memberikan gambaran mengenai tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang ada di suatu daerah adalah indeks Gini (Gini Rasio).

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, *tinggi* jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, *sedang* jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan *rendah* jika kurang dari 0,36.

**Grafik 3.4.**  
**Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2018**



Gini rasio kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada kisaran 0.3, dalam arti bahwa Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori ketimpangan

distribusi pendapatan *rendah*. Gini rasio selama kurun waktu tahun 2010 – 2018 adalah masing-masing 0,27 persen, 0.31 persen, 0.33 persen, 0.30 persen, 0.30 persen, 0.35 persen, 0.37 persen dan 0.34 persen dan 0,35 persen (grafik 3.4.).

### 3.8. Realisasi APBD

Struktur anggaran daerah mencerminkan besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif terkait dengan penganggaran dikarenakan adanya keterbatasan potensi dan sumber daya yang ada. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja pegawai secara implisit memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut hanya menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain belanja pegawainya. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah di luar belanja pegawai yang bisa didanai, khususnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 mencapai 4,3 trilyun rupiah. Mengalami kenaikan sebesar 10,29 persen dari tahun sebelumnya. Secara agregat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu penyumbang 1,69 trilyun rupiah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo. PAD Sidoarjo telah berhasil mendanai 39 persen kegiatan pembangunan daerah. Ada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 sebesar 14 milyar rupiah dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan PAD ini tentunya secara tidak langsung berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Peningkatan PAD harus diimbangi pula dengan kemampuan pengelolaan anggaran serta penentuan prioritas-prioritas pembangunan daerah sehingga tujuan pembangunan dapat lebih cepat dicapai.



Sedangkan proporsi dana perimbangan sebesar 41 persen terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa andil pemerintah pusat masih cukup besar dalam mendukung pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 3.8.**  
**Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2017- 2018**

URAIAN	Nilai (juta rupiah)	
	2017	2018
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.045.428</b>	<b>4.332.578</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	1.671.550	1.685.559
2. Dana Perimbangan	1.708.887	1.793.474
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	664.991	853.545
<b>B. BELANJA DAERAH</b>	<b>3.748.309</b>	<b>5.608.316</b>
<b>1. Belanja Tak Langsung</b>	<b>2.036.792</b>	<b>3.480.958</b>
Belanja pegawai	1.264.759	1.274.410
Belanja Hibah	145.911	217.991
Belanja Bantuan Sosial	47.732	57.659
Belanja Lainnya	578.390	1.930.898
<b>2. Belanja langsung</b>	<b>1.711.517</b>	<b>2.127.358</b>
Belanja Pegawai	127.876	145.368
Belanja Barang dan Jasa	1.018.408	1.171.424
Belanja Modal	565.233	810.565

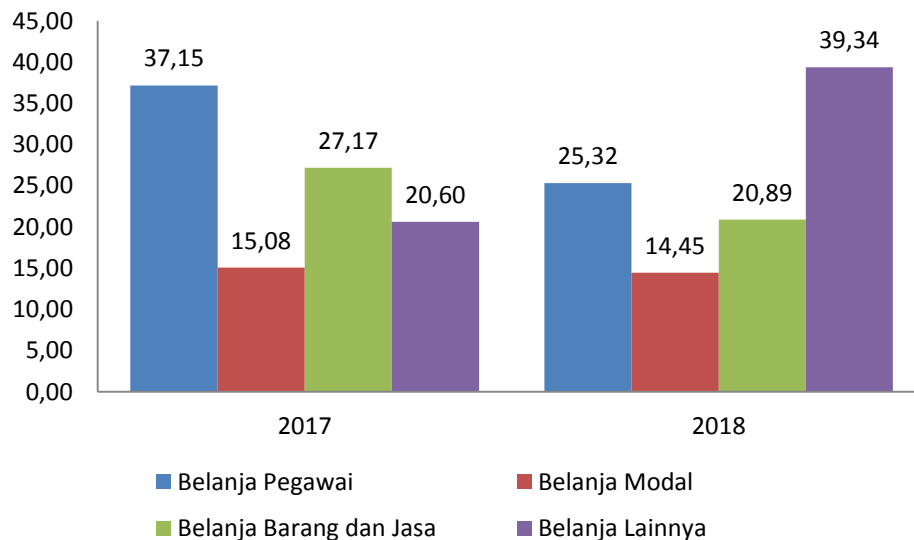
Secara agregat realisasi Belanja Daerah kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar 5,6 trilyun rupiah, mengalami kenaikan 49,62 persen dari tahun sebelumnya. Rincian penggunaan realisasi belanja daerah meliputi : belanja tidak langsung sebesar 3,48 trilyun rupiah dan belanja langsung sebesar 2,1 trilyun rupiah (lihat tabel 3.8).

Pada tahun 2019 terjadi lonjakan yang tinggi dalam penggunaan belanja lain-lain, sebesar 39,34 persen dari total belanja daerah. Sebagian besar peruntukan belanja tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemilu 2019, yaitu sebesar 1,42 triyun rupiah. Kegiatan nasional ini menghabiskan 25,32 persen anggaran belanja daerah.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Sidoarjo terutama digunakan untuk belanja pegawai. Pada tahun 2018, realisasi belanja pegawai daerah Kabupaten Sidoarjo mencapai 1,42 triliun rupiah. Jika disandingkan dengan besaran belanja pegawai tahun sebelumnya (sebesar 1,39 triliun rupiah), terjadi kenaikan belanja pegawai sebesar 1,95 persen atau sebesar 27,14 milyar rupiah.

Tentunya diperlukan kreatifitas serta inovasi dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan anggaran sehingga porsi belanja pegawai mampu untuk diminimalkan dan digunakan untuk belanja modal maupun belanja pembangunan yang lain (lihat gambar 3.4).

**Grafik 3.5.**  
**Persentase Rincian Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2018**



Realisasi belanja barang dan jasa selama tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 realisasi belanja barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1,02 triliun rupiah atau sebesar 22,49 persen terhadap total realisasi belanja daerah. Pada tahun 2018, realisasi belanja barang dan jasa mencapai 1,17 triliun rupiah atau sebesar 27,17 persen terhadap total realisasi belanja daerah. Terlihat pada tahun 2018 ada penambahan realisasi belanja barang dan jasa sebesar 153 milyar rupiah.

Kinerja realisasi belanja modal Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, realisasi belanja modal mencapai 565 milyar rupiah. Pada tahun 2018, terjadi penambahan realisasi belanja modal sebesar 43,40 persen dari tahun sebelumnya, realisasi belanja modal sebesar 811 milyar rupiah.

Pada tahun 2018 terjadi lonjakan kinerja belanja lain-lain. Belanja lain-lain menghabiskan anggaran belanja daerah sebesar 1, 93 trilyun rupiah. Sedangkan penggunaan belanja ini pada tahun 2017 hanya sebesar 578 milyar rupiah. Sebagian besar peruntukan belanja tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemilu 2019.

Untuk realisasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja lainnya. Proporsi realisasi belanja lainnya walaupun ada sedikit peningkatan, tidaklah banyak berubah dari tahun sebelumnya, pada kisaran 20 persen.

Struktur belanja daerah secara keseluruhan sedikit banyak akan memberikan gambaran mengenai arah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Diharapkan dengan penentuan prioritas pembangunan yang lebih baik serta diiringi dengan tata kelola anggaran yang cermat akan mampu memberikan kemampuan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

### **3.9. Indeks Pembangunan Manusia**

Dari tahun 2016-2018 tampak bahwa IPM Sidoarjo terus mengalami peningkatan, dari 78,17 (tahun 2016) menjadi 78,70 (tahun 2017) dan 79,50 (tahun 2018). Selama periode 2010-2018 angka IPM Kabupaten Sidoarjo sudah masuk dalam range “tinggi”. Pada tahun 2010 angka IPM Sidoarjo sebesar 74,78. Pada tahun 2012 sebesar 75,14; tahun 2013 sebesar 76,39; tahun 2014 sebesar 76,78; tahun 2015 sebesar 77,43 dan di tahun 2016 sebesar 78,17.

Capaian IPM Kabupaten Sidoarjo selama 10 tahun terakhir ini berada di atas Jawa Timur. Pada tahun 2018, dalam cakupan 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, posisi IPM Sidoarjo berada pada posisi keempat. Bahkan dalam cakupan kabupaten, Sidoarjo berada

pada posisi pertama. Besaran IPM Kota Malang dalam tiga tahun sebelumnya (2014-2016) menduduki peringkat teratas; pada tahun 2017-2018 digeser Kota Surabaya pada posisi pertama.

**Tabel 3.9.**  
**Angka IPM dan Rangka IPM Kabupaten Kota Se-Jawa Timur**  
**Tahun 2018**

Kabupaten/Kota	Rangking	Skor	Kabupaten/Kota	Rangking	Skor
Kota Surabaya	1	81,74	Banyuwangi	20	70,06
Kota Malang	2	80,89	Blitar	21	69,93
Kota Madiun	3	80,33	Ponorogo	22	69,91
Sidoarjo	4	79,50	Ngawi	23	69,91
Kota Kediri	5	77,58	Malang	24	69,40
Kota Blitar	6	77,58	Trenggalek	25	68,71
Kota Mojokerto	7	77,14	Bojonegoro	26	67,85
Gresik	8	75,28	Tuban	27	67,43
Kota Batu	9	75,04	Pasuruan	28	67,41
Kota Pasuruan	10	74,78	Pacitan	29	67,33
Magetan	11	72,91	Situbondo	30	66,42
Mojokerto	12	72,64	Jember	31	65,96
Kota Probolinggo	13	72,53	Pamekasan	32	65,41
Tulungagung	14	71,99	Bondowoso	33	65,27
Lamongan	15	71,97	Sumenep	34	65,25
Jombang	16	71,86	Probolinggo	35	64,85
Nganjuk	17	71,23	Lumajang	36	64,83
Kediri	18	71,07	Bangkalan	37	62,87
Madiun	19	71,01	Sampang	38	61,00

Capaian yang sangat menggembarakan ini tidak terlepas dari pemerintah daerah yang selalu melaksanakan program-program yang meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusianya.

**Komponen IPM****3.9.1. Dimensi Kesehatan**

Dimensi kesehatan direfleksikan dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH penduduk Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode baru dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013 – 2018) masih stabil berkisar pada angka 73 tahun. Pada tahun 2013 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo 73,43 tahun; di tahun 2017 mencapai 73,82 tahun.

**3.9.2. Dimensi Pendidikan**

Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum kemajuan pendidikan suatu wilayah.

**3.9.2.1. Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang berarti. Pada periode 2013 - 2015 angka harapan lama sekolah Kabupaten Sidoarjo berada pada kisaran 12—13 tahun (tahun 2013 sebesar 13,25; tahun 2014 sebesar 13,55 dan tahun 2015 sebesar 13,89). Mulai tahun 2016 angka harapan sekolah melebihi angka 14 tahun (tahun 2016 sebesar 14,13; tahun 2017 sebesar 14,34 dan tahun 2018 sebesar 14,75).

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar 14,75; berarti pada tahun 2018 diharapkan penduduk Sidoarjo usia 7 tahun ke atas dapat mengenyam pendidikan sampai lulus jenjang pendidikan di atas SLTA, bisa mencapai jenjang Diploma III (15 tahun pendidikan formal).

**3.9.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Tahun 2018 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 10,24 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Kabupaten Sidoarjo menekuni pendidikan formal (sekolah) selama 10 tahun. Ketika pada jenjang pendidikan setingkat SD membutuhkan waktu normal 6 tahun dan pada jenjang pendidikan

setingkat SLTP membutuhkan waktu normal 3 tahun; maka rata-rata penduduk Sidoarjo secara umum telah menamatkan pendidikan sampai pada jenjang setingkat SLTP, dan sudah melewati jenjang kelas 1 SMU.

### 3.9.3. Dimensi Pengeluaran

Kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tingginya kemampuan daya beli. Semakin tinggi kemampuan daya beli masyarakat maka semakin baik kondisi ekonominya. Kemampuan daya beli masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah tingkat pendapatan, pola konsumsi dan perkembangan harga-harga.

Perkembangan harga-harga akan mencerminkan tingkat inflasi. Jika terjadi kondisi pendapatan masyarakat turun sedangkan nilai inflasi naik maka kecenderungannya kemampuan daya beli masyarakat akan turun. Kalau dilihat secara umum kemampuan daya beli masyarakat tahun 2018 di Kabupaten Sidoarjo secara nominal mengalami peningkatan sebesar 3,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya nilai PDRB perkapita penduduk.

**Tabel 3.10.**  
**Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2013 - 2018**

Tahun	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun
2013	12.602
2014	12.632
2015	12.879
2016	13.320
2017	13.710
2018	14.168

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha bersama antara pemerintah, swasta serta masyarakat untuk mencapai tujuan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan visi, misi dan strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) maupun Jangka Menengah.

Pembangunan harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Diperlukan perencanaan dan penentuan prioritas pembangunan, monitoring dari proses pembangunan yang sedang berlangsung maupun evaluasi hasil yang pembangunan yang telah dicapai secara terus-menerus untuk lebih mempercepat pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri. Pengumpulan berbagai indikator pembangunan menjadi dasar dari evaluasi hasil yang telah dicapai maupun untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

Beberapa indikator ekonomi yang ada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 yaitu tumbuh sebesar 6,05 persen, naik dari tahun sebelumnya sebesar 5,80 persen. Iklim ekonomi mulai membaik di Sidoarjo didukung stabilitas perekonomian nasional yang baik dan inflasi yang rendah di Jawa Timur dan nasional.
2. Tiga sektor ekonomi yang selalu dominan kontribusinya di Kabupaten Sidoarjo yaitu: 1) Industri Pengolahan, 2) Perdagangan, Hotel dan Restoran, 3) Pengangkutan dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut telah menjadi tulang punggung bagi perekonomian di Sidoarjo karena kontribusinya yang sangat tinggi (lebih dari 70 persen).
3. Inflasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar 4,11 persen. Inflasi tertinggi pada bulan Desember sebesar 0.61 persen dan terendah bulan September yaitu -0,01 persen. Sementara pada bulan Juni (bertepatan hari raya Idul Fitri) yang biasanya mengalami

inflasi tinggi hanya mengalami inflasi 0.45 persen. Deflasi pada tahun 2018 terjadi sekali yaitu bulan September.

4. Harga eceran di perdesaan untuk konsumsi makanan di Kabupaten Sidoarjo pada 2018 cenderung stabil antar bulannya. Sedangkan harga eceran perdesaan untuk konsumsi non makanan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya
5. Gini rasio kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada kisaran 0.30, dalam arti bahwa Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori ketimpangan distribusi pendapatan *rendah*.
6. Sebagian besar peruntukan realisasi belanja daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 digunakan untuk belanja lainnya dan belanja pegawai. Realisasi belanja barang dan jasa selama tahun 2018 mengalami penambahan 153 milyar rupiah dari tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja modal Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 mengalami peningkatan 43,40 persen dari tahun sebelumnya.
7. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 mencapai 4,3 trilyun rupiah. Secara agregat, Pendapatan Asli Daerah mampu penyumbang 1,69 trilyun rupiah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo. PAD Sidoarjo telah berhasil mendanai 39 persen kegiatan pembangunan daerah. Ada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 sebesar 14 milyar rupiah dibanding tahun sebelumnya.
8. Capaian IPM Kabupaten Sidoarjo selama 10 tahun terakhir terus naik. IPM Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 adalah sebesar 79,50. Besaran IPM ini tergolong dalam kategori “tinggi”.





**Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sidoarjo  
Jl. Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo  
Telpon (031) 8941145**